

Kesejahteraan Masyarakat Pengelola Hutan Rakyat di Desa Sinar Banten

Lilik Fauziah¹, Susni Herwanti^{1*}, Indra Gumay Febryano^{1,2,3}, Hari Kaskoyo^{1,2,3}, Christine Wulandari^{1,2,3}, Novriyanti¹, Dian Iswandaru¹, Arief Darmawan^{1,2,3}, Yulia Rahma Fitriana^{1,2,3}, Rahmat Safe'i^{1,2,3}

¹Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Universitas of Lampung

²Master of Forestry, Universitas of Lampung

³Master in Environmental Science, Universitas of Lampung

*email: sh4nt@yahoo.com

Artikel Info

Received: 19 agustus 2022

Received is revised: 20 september 2022

Accepted: 16 mei 2023

Publish online: 11 november 2023

Abstract

It is very important to study the food welfare of the community to see the standard of living of private forest farmers. The purpose of this study was to analyze the level of food welfare of private forest farming communities in Sinar Banten Village, Ulu Belu District, Tanggamus Regency. Data collection was carried out by means of interviews, direct observation and documentation studies. The sampling technique was carried out by means of purposive sampling. Data analysis was carried out quantitatively and descriptively to analyze the level of welfare of the community managing private forest based on food needs. The results showed that the people of Sinar Banten Village were at the food adequacy level of 90% if analyzed using the Sajogyo theory and 70% of the community was able to meet minimum physical needs if analyzed using the Tanggamus District Minimum Wage (UMK). Farmers are expected to be able to optimize forest land by planting plants other than coffee (*Coffea*) such as *Piper nigrum* (pepper), *Syzygium aromaticum* (clove), *Parkia speciosa* (peta) and *Areca catechu* (areca nut) to increase farmers' income so that farmers' welfare increases.

Keywords: private forest, farmer's welfare level, income

Abstrak

Kesejahteraan pangan masyarakat sangat penting diteliti untuk melihat taraf hidup dari petani hutan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesejahteraan pangan masyarakat petani hutan rakyat di Desa Sinar Banten, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola hutan rakyat berdasarkan kebutuhan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sinar Banten berada dalam level kecukupan pangan sebesar 90% jika dianalisis menggunakan teori Sajogyo dan sebesar 70% masyarakat mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum jika dianalisis menggunakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanggamus. Petani diharapkan dapat mengoptimalkan lahan hutan dengan menanam tanaman selain kopi (*Coffea*) seperti *Piper nigrum* (lada), *Syzygium aromaticum* (cengkeh), *Parkia speciosa* (petai) dan *Areca catechu* (pinang) untuk meningkatkan pendapatan petani agar kesejahteraannya meningkat.

Kata kunci: hutan rakyat, tingkat kesejahteraan keluarga, pendapatan

PENDAHULUAN

Hutan rakyat merupakan hutan yang dibangun di atas tanah milik rakyat dan tidak dibebani oleh hak milik negara yang berada di luar kawasan hutan negara. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang telah dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk didominasi tanaman kayu-kayuan. Hutan rakyat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya petani hutan rakyat yaitu dari segi pendapatan, kesejahteraan masyarakat, penyedia bahan industri serta kebutuhan pangan (Irundu *et al.*, 2019; Suherdi *et al.*, 2014). Manfaat secara tidak langsung dapat dilihat dari segi ekologi, ekosistem, perlindungan lingkungan seperti perbaikan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi air dan tanah serta perbaikan mutu lingkungan (Hudiyani *et al.*, 2017). Hutan rakyat dapat menjadi modal awal yang bisa digunakan untuk mengelola sumber daya hutan guna mencapai ekonomi yang lebih baik berdasarkan inisiatif dari masyarakat (Awang, 2005; Mulyadi, 2013). Pengelolaan sumber daya hutan di lahan hutan rakyat lebih diarahkan pada usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi di luar kawasan hutan negara. Sumber daya hutan yang masuk dalam pengelolaan tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya, sehingga hutan rakyat dapat berorientasi sebagai alternatif masalah kebutuhan pangan (Puspitojati *et al.*, 2014).

Kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat yang ada di pedesaan rata-rata menggantungkan hidupnya pada kekayaan sumber daya alam, termasuk kekayaan dari hutan rakyat. Masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidupnya pada lahan yang dimiliki. Produktifitas lahan garapan sangat penting untuk diperhatikan, hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara menerapkan pola tanam dengan sistem agroforestri pada lahan yang akan dikelola. Lahan yang dikelola dengan sistem agroforestri dapat memberi pengaruh pada produktivitas lahan (Wenderi *et al.*, 2019).

Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari produktivitas lahan milik petani merupakan alternatif yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dari tekanan sumber daya hutan (Pratama *et al.*, 2015). Pendapatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan dan kesejahteraan petani. Hutan rakyat di sekitar KPH batutegi merupakan hutan rakyat yang dibina oleh PT Nestle selama 20 tahun. Penelitian terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di hutan rakyat sudah banyak diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada hutan rakyat yang merupakan binaan PT Nestle. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, tingkat kesejahteraan diukur dengan teori Sajogyo dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanggamus. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan pangan masyarakat petani hutan rakyat di Desa Sinar Banten, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Sinar Banten, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus pada bulan Juli 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode kuantitatif dan deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Responden yang diwawancarai berjumlah 10 orang, hal tersebut merupakan rekomendasi dari KPH Batutegi yang menyatakan bahwa 10 orang tersebut dianggap paling mengerti terkait pengelolaan hutan rakyat di Desa Sinar Banten.

Tingkat kesejahteraan pangan rumah tangga petani diukur berdasarkan besarnya pendapatan per kapita per tahun yang disetarakan dengan nilai beras setempat menurut kriteria Sajogyo 1997. Pembagian tersebut dibagi menjadi enam kelompok, yaitu:

1. Paling miskin jika pendapatan per kapita keluarga, 180 kg setara beras/tahun
2. Miskin sekali jika pendapatan per kapita 181-240 kg setara beras/tahun
3. Miskin jika pendapatan per kapita 241-320 kg setara beras/tahun
4. Nyaris miskin jika pendapatan per kapita 321-480 kg setara beras/tahun
5. Cukup jika pendapatan per kapita 481-960 kg setara beras/tahun.
6. Hidup layak jika pendapatan >960 kg setara beras/tahun.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur juga menggunakan UMK Tanggamus berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor G.634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021, UMK Tanggamus tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.2.440.486,18 Juta. Masyarakat yang berpendapatan melebihi UMK yang telah ditetapkan dianggap lebih sejahtera atau terpenuhi kebutuhan fisik minimumnya dibandingkan dengan masyarakat yang berpendapatan kurang dari UMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Tingkah Kesejahteraan Pangan Menurut Sajogyo 1997

Berdasarkan kriteria Sajogyo (1997), tingkat kesejahteraan pangan dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan per kapita per tahun yang diukur dengan standar harga beras per kilogram di lokasi penelitian dan pada waktu penelitian dilakukan. Harga beras di Sinar Banten yaitu sebesar Rp.10.000/kg. Berdasarkan kriteria Sajogyo, responden yang memiliki pengeluaran 240-320 kg nilai tukar beras/orang/tahun berada dalam ambang kecukupan pangan atau belum sejahtera sedangkan responden yang memiliki pengeluaran 360-480 kg beras/orang/tahun berada dalam level kecukupan pangan atau sejahtera. Analisis tingkat kesejahteraan pangan responden menurut Sajogyo (1997) dapat disajikan pada Tabel 1.

Analisis Tingkat Kesejahteraan Menurut Upah Minimum Kabupaten

Pendapatan per bulan masyarakat petani yang melebihi UMK diasumsikan lebih sejahtera dibandingkan masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari UMK (Primawati *et al.*, 2017). Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum dan butuh banyak kajian mengenai tingkat harga di daerah sebagai acuan utama untuk menentukan upah minimum atau dasar kebutuhan fisik minimum. Penetapan dari penentuan kebutuhan fisik minimum bertujuan supaya pekerja dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan pantas. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan UMK Tanggamus disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani responden di Sinar Banten berdasarkan kriteria Sajogyo (1997).

No	Jumlah tanggungan keluarga (jiwa)	Pendapatan		Konsumsi beras/tahun (kg)	Kriteria kesejahteraan
		Total (Rp)	Per kapita (Rp)		
1.	6	18.920.000	3.153.333	315	Nyaris Miskin
2.	4	19.450.000	4.862.500	486	Cukup
3.	4	87.725.000	21.931.250	2.193	Layak
4.	1	20.450.000	20.450.000	2.045	Layak
5.	3	104.150.000	34.716.666	3.471	Layak
6.	3	79.050.000	26.350.000	2.635	Layak
7.	5	50.395.000	10.079.000	1.007	Layak
8.	5	106.400.000	21.280.000	2.128	Layak
9.	6	30.936.000	5.156.000	515	Cukup
10.	5	73.000.000	14.600.000	1.460	Layak

Tabel 2. Analisis pendapatan petani hutan rakyat menurut UMK

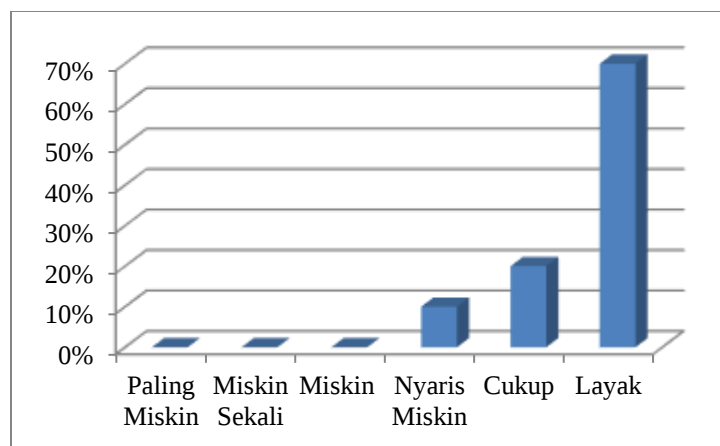
No	UMK (Rp)	Jumlah Responden	Persentase
1	< Rp.2.440.486	7	70%
2	> Rp.2.440.486	3	30%

Pembahasan

Analisis Tingkat Kesejahteraan Pangan Menurut Sajogyo 1997

Menurut Andrianto *et al.* (2016), rumah tangga yang berada pada garis kemiskinan disebabkan pendapatan yang didapat oleh petani cukup rendah dan tidak menentu setiap tahunnya yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan belum tercapai. Tingkat kesejahteraan pangan responden dapat meningkat dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan seperti ojek, buruh, pedagang, guru dan mengelola lahan lain seperti HKm. Responden di Desa Sinar Banten dapat dikatakan berada dalam level kecukupan pangan sebesar 90% dengan rata-rata pendapatan Rp 30.387.600 per tahunnya dan sebesar 10% berada dalam level belum sejahtera atau ambang kecukupan pangan. Hal tersebut disebabkan oleh lahan garapan yang dikelola hanya 1 ha dan jumlah tanggungan keluarga yang ditanggung banyak. Akan tetapi, tingkat kesejahteraan yang dianalisis dengan teori Sajogyo 1997 hanya diukur berdasarkan kebutuhan pangan saja, sehingga penelitian ini perlu ditindak lanjuti untuk mengukur tingkat kesejahteraan berdasarkan indikator lain seperti kesehatan, pendidikan, pengeluaran per bulan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lain nya.

Luas lahan yang dikelola juga berpengaruh dalam besarnya pendapatan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marandita (2019) yang menyatakan bahwa luas lahan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pendapatan petani. Tanaman dan jumlah komoditas yang ditanam pun akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarni *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kesejahteraan akan meningkat jika adanya tambahan tanaman dari komoditas lain selain kopi. Akan tetapi, dalam penelitian ini, kesejahteraan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, terbukti dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat bisa hidup layak. Petani hutan rakyat ini tergolong hidup cukup hingga layak karena lebih dari 50% petani hutan rakyat sudah sejahtera. Tingkat kesejahteraan di Desa Sinar Banten disajikan pada Gambar 1.

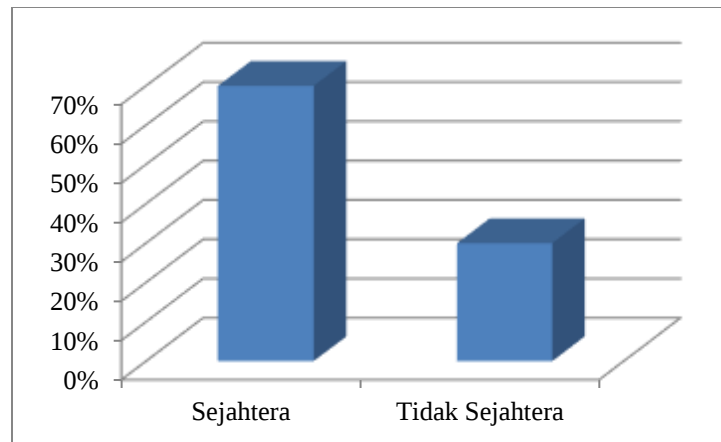


Gambar 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sinar Banten

Analisis Tingkat Kesejahteraan Menurut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanggamus

Pendapatan yang telah memenuhi atau melebihi batas UMK dapat dikatakan lebih terpenuhi kebutuhan fisik minimumnya dibandingkan masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari UMK. UMK di setiap daerah pastinya akan berbeda dengan daerah lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga yang berlaku di masing-masing daerah, karena harga yang berlaku di suatu daerah bisa saja berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki wewenang dalam menetapkan pedoman untuk menentukan kebutuhan fisik minimum dan dibutuhkan banyak kajian mengenai tingkat patokan harga di masing-masing daerah sebagai acuan utama dalam menentukan upah minimum atau kebutuhan fisik minimum (Pratomo *et al.*, 2011).

Pendapatan rata-rata di Desa Sinar Banten sebesar Rp 4.920.633/bulan. Hal ini berarti bahwa petani dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum berupa kebutuhan pangan setiap bulan. Pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan total yang diperoleh dari pendapatan hutan rakyat dan non-hutan rakyat. Pekerjaan sampingan dapat menjadi alternatif petani untuk memperoleh tambahan pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi (2021) yang menyatakan bahwa pekerjaan sampingan sangat berpengaruh dalam menambah tingkat pendapatan. Pendapatan tambahan juga bisa diperoleh dari memaksimalkan lahan yang dikelola dengan cara menambah variasi dan jumlah tanaman komersial seperti *Piper nigrum*, *Syzygium aromaticum*, *Parkia speciosa* dan *Areca catechu*. Tingkat kesejahteraan berdasarkan UMK Tanggamus di Desa Sinar Banten disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan UMK Tanggamus di Desa Sinar Banten

KESIMPULAN

Kesejahteraan petani di desa sinar banten berada dalam level kecukupan pangan sebesar 90% dan 10% berada dalam level ambang kecukupan pangan sesuai teori sajogyo (1997), sedangkan kesejahteraan petani yang dianalisis menurut keputusan gubernur lampung nomor g.634/v.08/hk/2021 tanggal 19 november 2021, umk tanggamus tahun 2022 bahwa petani berada dalam level sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya sebesar 70% dan belum sejahtera atau belum mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya sebesar 30%. Petani dapat mengoptimalkan lahan garapan dengan menanam tanaman selain kopi (*coffea*) seperti *piper nigrum* (lada), *syzygium aromatic* (cengkeh), *parkia speciosa* (petai) dan *areca catechu* (pinang) hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak PT.Nestle yang telah banyak membantu penelitian ini terutama dalam pendanaan, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung tahun pelaksanaan 2022 dengan nomor kontrak 4190/UN26.14/TU.00.00/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. 2005 *Petani, Ekonomi dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan. Pustaka Hutan rakyat*. Press Dephut. Yogyakarta
- Andrianto, A., Qurniati, R., Setiawan, A. Pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap tingkat kemiskinan masyarakat sekitar mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(3): 1107-1113.
- Hudiyani, I., Purnaningsih, N., Asngari, P.S., Hardjanto. 2017. Persepsi petani terhadap hutan rakyat pola agroforestri di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*. 13(1): 64-78.
- Hutasoit, M.F., Prasmatiwi, F.E., Suryani, A. 2019. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 7(3): 343-356.
- Irundu, D., Fatmawati, D. 2019. Potensi hutan rakyat sebagai penghasil pangan di Desa Paku Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 11(1): 41-48.

- Mulyadii, M. 2013. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10(4): 224-234.
- Pratama, A.R., Yuwono, S.B., Hilmanto, R. 2015. Pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok pemilik hutan rakyat di Desa Bandar dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 99-12.
- Pratomo, D.S., Saputra, P.M.A. 2011. Kebijakan upah minimum untuk perekonomian yang berkeadilan. *Joutnal of Indonesian Applied Economics*. 5(2): 269-285.
- Primawati, Lydia., Bambang, N.A., Hapsari, T.R. 2017. Analisis tingkat kesejahteraan nelayan penerima dan non penerima pump di Desa Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Semarang. *Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 6(4): 74-83.
- Puspitojati, T., Rachman, E., Ginoga, K.L. 2014. *Hutan Tanaman Pangan Realitas, Konsep dan Pengembangan*. PT Kanisius. Bogor
- Sajogyo, T. 1997. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pangan*. LPSB-IPB. Bogor. 299p.
- Suherdi., Amanah, S., Muljono, P. 2014. Motivasi Petani dalam Pengelolaan Usaha Hutan rakyat, Desa Cingambul, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan*. 10(1): 85-93.
- Syofiandi, R.R., Hilmanto, R., Herwanti, S. 2016. Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani agroforestri di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 17-26.
- Wanderi. Qurniati, R., Kaskoyo, H. 2019. Kontribusi tanaman agroforestri terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 118-127.
- Winarni, S., Yuwono, S.B., Herwanti, S. 2016. Struktur Pendapatan, Tingkat Kesejahteraan dan Faktor Produksi Agroforestri Kopi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 1-19.